



**PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman Sahri Harahap
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) serta Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Pihak Pertama,

Muhammad Yusuf Ateh

Arman Sahri Harahap

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	77,00
		2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00
		3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100,00
		4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00
		5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00
		6	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
		7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65,00
		8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76,00

Program

Anggaran

1	Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp	2.596.670.000,00
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp	34.250.554.000,00
		Rp	36.847.224.000,00

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP

Kepala Perwakilan

Muhammad Yusuf Ateh

Arman Sahri Harahap

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP SULAWESI SELATAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	758,00
		2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	1.673,50
		3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	154.035,50
		4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	49.715,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00
		2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0,00
		2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10,00
		3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4,00
		4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00
		3	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1,00
		2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	15,00
		3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1,00
		4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	20,00
		5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	0,00
		6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	3,00
		7	Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100,00
		8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	8,00
		9	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	8,00
		10	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	111,00
		11	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	1,00
		12	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204	-	√	-	-
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204	-	-	√	-
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204	√	-	-	-
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204	-	√	-	-
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204	-	√	-	-
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203	√	√	√	√
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203	√	√	√	√
8	A.2.b.	Stunting	204	-	-	√	-
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201	-	-	-	√
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203	-	-	-	√
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203	-	-	-	√
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203	-	-	-	√
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203	√	-	-	-
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203	-	√	-	-
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302	-	√	-	-
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303	-	√	-	-
17	B.1.a.	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	103	-	-	-	√
18	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√
19			405	-	-	-	√
20	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√
21	B.2.a.	Infrastruktur Jaringan Gas	102	-	-	√	-
22			404	-	-	√	-
23	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-
24	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√
25	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√
26	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	103	-	-	-	√
27	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	103	-	-	-	√
28	B.3.f.	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	402	-	-	-	√
29	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-
30	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-
31	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-
32	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√
33	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-
34	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-
35	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√
36	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-
37		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√
38	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-
39	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-
40	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√
41	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√
42	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-
43	D.4.b.	P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-
44	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	√

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
45	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-
46	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-
47		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-
48		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-
49	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	√	-
50		Tata Kelola Program Bibit Ternak	302	-	-	√	-
51		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	√	-
52	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	102	-	-	√	-
53		Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	302	-	-	√	-
54		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	√	-
55	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-
56	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	102	-	-	√	-
57		Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (Pemda)	302	-	-	√	-
58	E.5..a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	√	-
59	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-
60	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√
61	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√
62	F.2.a	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-
63	F.2.b	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-
64	F.2.c	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-
65	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-
66	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-
67	G.3.c.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	104	-	-	√	-
68	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-
69			103	-	-	√	-
70	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP

Kepala Perwakilan

Muhammad Yusuf Ateh

Arman Sahri Harahap

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	RENDAL	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pariwisata	Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis desain/kebijakan/strategi atas Program Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep. 2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep. 3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep. 4. Analisis kinerja Program Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep dihubungkan dengan <i>environmental sustainability</i>, konservasi kekayaan budaya dan situs bersejarah, peningkatan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). 5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait. 	D 1.3				✓
2	Pemulihan Ekonomi	Pengawasan atas Dukungan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis desain/kebijakan atas Dukungan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah dalam konteks perluasan cakupan (<i>coverage</i>) UMKM penerima bantuan. 2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Dukungan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah. 3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Dukungan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah. 4. Analisis kinerja Dukungan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah untuk mendukung Program PEN dihubungkan ke peningkatan aksesibilitas UMKM ke pendanaan/modal, peningkatan produktivitas UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). 5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait. 	D 1.4				✓

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP

Kepala Perwakilan

Muhammad Yusuf Ateh

Arman Sahri Harahap